

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Gerakan Sosial

Gerakan feminisme merupakan salah satu dari gerakan sosial, termasuk dalam bagian dari aktivitas yang ditujukan untuk mengakomodir gerakan perubahan menjadi lebih baik. Dalam penelitian kali ini, peneliti menjelaskan definisi, tahapan, dan faktor-faktor dari gerakan sosial berlandaskan pada buku karya Oman Sukmana berjudul “Konsep dan Teori Gerakan Sosial” (Sukmana, 2016).

Menurut John J. Macionis, ia menyatakan bahwa gerakan sosial atau *social movement* adalah aktivitas yang diorganisir dengan ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Macionis memfokuskan pengertian atau definisi dari gerakan sosial menjadi dua poin utama yaitu adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Menurut Shepard Greene, ia menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk perilaku kolektif yang bertahan lama, terstruktur, dan rasional dengan beberapa karakteristiknya yaitu berisikan sejumlah orang, memiliki tujuan untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial, adanya struktur kepemimpinan yang diakui, adanya aktivitas yang berjalan dan dipertahankan dalam waktu yang lama, serta gerakan sosial yang bersifat relatif permanen dan terorganisir.

Menurut David A. Locher, ia berpendapat bahwa ketika sekelompok orang sedang mengatur atau mengorganisir dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka orang-orang tersebut sedang menciptakan dan melakukan sebuah gerakan sosial. Orang-orang di sini adalah yang bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal yaitu suatu perubahan sosial.

Maka, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan bersama-sama dan dengan tujuan yang sama untuk menghambat atau menolak suatu perubahan sosial dengan ciri yaitu gerakan yang dilakukan oleh warga negara, bersifat *collective action* atau dilakukan bersama-sama, memiliki tujuan dan strategi, serta gerakan yang terkait dengan isu publik atau keresahan bersama.

Menurut Sidney Tarrow dalam bukunya "*Power in Movement*" (1998), gerakan sosial tidak selalu tentang organisasi secara formal, tapi Tarrow memfokuskan gerakan sosial pada aksi gerakan demi mewujudkan perlawanan kepada pihak penguasa daripada formalisasi organisasinya. Dalam melihat dinamika gerakan sosial dan wujud implementasinya, Tarrow mengemukakan adanya 5 tahapan dalam melakukan aksi protes kepada pihak penguasa yang dilakukan oleh masyarakat tertekan. Pertama, *heightened conflict*, yaitu ketika suatu permasalahan muncul dalam sistem sosial pada konteks industri, lingkungan pedesaan dan perkotaan, serta institusi pendidikan. Kedua, *geographic and sectoral diffusion*, yaitu ide dan gagasan yang disusun telah tersebar dari daerah yang berkonflik atau sentral hingga meluas ke daerah lain yang memicu munculnya gelombang protes dan gerakan

secara masal. Ketiga, *social movement organizations*, yaitu munculnya organisasi untuk mengkoordinasikan dan mengawal setiap strategi dan tujuan yang ingin dicapai agar muncul hasil yang sesuai. Keempat, *new frames of meaning*, ketika gerakan protes melahirkan ideologi baru yang menjadi landasan pemahaman atas realitas yang dialami. Kelima, *expanding repertoires of contention*, yaitu gerakan sosial yang dijadikan sebagai wadah protes sosial dan gerakan atau protes baru yang akan muncul di kemudian (Irawan *et al.*, 2022).

Selanjutnya, terdapat 4 tahapan proses gerakan sosial menurut Macionis. Pertama, tahap *emergence* atau tahap kemunculan. Pada tahap ini, gerakan sosial didorong oleh dua persepsi bahwa segala sesuatu muncul karena penyebaran ketidakpuasan dan muncul karena kesadaran yang diinisiasi oleh individu atau kelompok kecil tentang isu tertentu. Kedua, *coalescence* atau tahap penggabungan. Setelah tahap kemunculan, suatu gerakan sosial harus menunjukkan dirinya ke publik, dan seorang pemimpin harus menentukan kebijakan, merumuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan penambahan sumber daya manusia. Dalam tahap ini, gerakan terlibat pada tindakan kolektif seperti aksi ke jalanan atau kegiatan demonstrasi untuk menarik perhatian publik dan massa. Gerakan sosial pada tahap ini juga memungkinkan untuk membuat suatu organisasi atau aliansi. Ketiga, *bureaucratization* atau tahap birokratisasi. Untuk menjadi sebuah kekuatan politik, gerakan sosial harus disertai dengan birokrasi agar menjadi suatu gerakan yang mapan dan memiliki anggota yang mumpuni dan loyal terhadap ideologi gerakan sosialnya. Keempat, *decline* atau tahap penurunan/kemunduran. Suatu gerakan akan mengalami kemunduran pada masanya karena dianggap telah berhasil

dalam mencapai tujuannya atau bahkan mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi. Juga kemunduran bisa karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan, tekanan dari pihak eksternal, dan karena gerakan tersebut dapat diterima ke dalam bagian dari suatu sistem sehingga tidak adanya tantangan.

Gerakan sosial adalah suatu gerakan kolektif yang dicirikan dengan persamaan pandangan dan gagasan dari kelompoknya. Menurut Locher, ada 5 faktor penentu keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Pertama, kepemimpinan yang efektif, yaitu seorang pemimpin yang dapat memahami sistem hukum dan politik dan memusatkan prioritas mereka untuk mencapai tujuan bersama dari kelompok yang ia pimpin. Karena, dalam gerakan sosial, tipe pemimpin yang paling efektif adalah seorang pemimpin yang dapat menginspirasi dan mengajak orang lain untuk mengikuti aksi gerakan sosial sebagai tindakan dan meningkatkan peluang bahwa setiap gerakan sosial akan berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan kedua yaitu citra positif atau mendapatkan sikap penghargaan. Suatu gerakan dapat meyakinkan para elite pemegang otoritas bahwa gerakan sosialnya adalah gerakan yang baik dan hanya bergerak demi suatu kebenaran dan positif, agar bisa mendapatkan dukungan dan keyakinan publik bahwa gerakan tersebut bersifat rasional dan mulia.

Ketiga, faktor penentu keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial adalah memiliki taktik yang dapat diterima oleh publik. Ketika suatu taktik atau strategi yang dipilih dapat dipercaya dan diyakini oleh masyarakat mampu dan efektif dalam mencapai tujuan bersama, maka akan memberikan dampak terhadap

pembentukan rasa hormat dan citra positif dari publik, juga dapat memobilisasi sumber daya manusia untuk dapat mengikuti suatu gerakan sosial bersama.

Keempat, gerakan sosial memiliki tujuan yang dapat diterima oleh publik. Suatu gerakan sosial akan dianggap berhasil jika publik percaya bahwa gerakan sosial tersebut adalah hanya untuk kepentingan masyarakat. Gerakan sosial yang memiliki ideologi sesuai dengan tujuan sosial yang dominan, maka akan semakin percaya masyarakat bahwa gerakan tersebut sebagai suatu tujuan yang rasional. Kelima, gerakan sosial yang mendapatkan dukungan kebudayaan, politik, dan finansial untuk mempertahankan partisipan dan mampu meyakinkan publik.

Gerakan sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menuntut suatu perubahan. Gerakan sosial dapat muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (L. Fauziah, 2025). Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama melalui gerakan kolektif di luar lingkup lembaga mapan. Gerakan sosial ini merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menunjang tujuan bersama yang ingin dicapai dalam suatu tindakan kolektif.

Dalam penelitian ini, gerakan feminisme termasuk ke dalam gerakan sosial baru menurut Rajendra Singh. Gerakan sosial baru (*new social movement*) terjadi pada tahun 1980-an atau pasca industri (*post-industrial*) di Amerika dan Eropa yang lebih berfokus pada gerakan menuntut hak asasi manusia, feminisme, lingkungan hidup, kultural, dan lainnya. Menurut Singh, pada gerakan ini bertujuan dan memiliki nilai secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk

memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Menurut Nelson A. Pichardo, gerakan sosial baru memiliki 4 karakteristik di antaranya, pertama yaitu aspek tujuan dan ideologi yang berarti gerakan sosial baru menekankan perhatian pada kualitas dan gaya hidup dengan nilai yang berpusat pada otonomi dan identitas. Aspek kedua yaitu taktik, merupakan cerminan dari orientasi ideologi yang berada di luar saluran politik, taktik mengganggu, dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik. Gerakan sosial baru tetap berada pada ranah sebagai wujud dari protes masyarakat kelas menengah sebagai upaya memberantas tekanan kelompok politik untuk gerakan sosial. Aspek ketiga adalah struktur, dengan menciptakan struktur yang responsif terhadap individu, terbuka, desentralis, dan non-hierarkis. Aspek terakhir adalah partisipan, dalam gerakan sosial baru tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai dengan perhatian umum atas isu-isu sosial. Basis partisipan gerakan sosial adalah ideologinya, bukan berupa etnis, agama, ras, atau golongan tertentu.

Dalam teori gerakan sosial ini, Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya yang mengimplementasikan gerakan feminisme sebagai prinsip perjuangannya termasuk ke dalam gerakan sosial baru karena memperjuangkan mengenai isu kultural. Lembaga Taman Jingga pernah melakukan edukasi, audiensi, dan kampanye secara langsung maupun di media sosial, dan hal tersebut termasuk ke dalam beberapa ciri dari gerakan sosial yaitu berkenaan dengan isu publik, memiliki tujuan yang ingin diraih, serta dilakukan secara bersama-sama atau suatu tindakan kolektif. Untuk mengidentifikasi berbagai bentuk cara dan strategi tindakan kolektif suatu

kelompok atau organisasi demi menyampaikan tujuan gerakan tersebut, penulis menggunakan teori Repertoar Aksi dari Charles Tilly dengan teknik penelitian wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk menganalisis dan mengidentifikasi prinsip serta strategi Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya.

Gerakan sosial menurut Charles Tilly adalah serangkaian interaksi yang berkelanjutan antara otoritas (pemegang kekuasaan) dengan para penentangannya (individu atau kelompok masyarakat) berdasarkan kepentingan dan tujuan tertentu. Salah satu teori dari Charles Tilly dalam gerakan sosial adalah teori repertoar aksi. Teori Repertoar aksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk gerakan atau tindakan perlawanan kolektif yang digunakan oleh organisasi atau kelompok untuk menyampaikan tujuannya.

Teori *repertoire* ditemukan dan dikembangkan oleh Charles Tilly pada tahun 1970-1995. Teori ini pertama kali digunakan untuk menganalisis ketegangan politik di Inggris Raya pada tahun 1758-1834 dan pada kasus revolusi perlawanan politik buruh tanah dan pekerja peternakan di Burgundy pada tahun 1675-1975 (Syawaludin, 2017). Repertoar aksi adalah serangkaian cara atau strategi yang digunakan untuk memperlihatkan dan menyampaikan gerakan serta perlawanan terhadap suatu fenomena atau kebijakan tertentu (Hadi *et al.*, 2025). Secara sederhana, Charles Tilly mengungkapkan bahwa repertoar adalah seperangkat alat, strategi, atau metode yang digunakan oleh suatu organisasi atau kelompok untuk meraih dan mencapai keinginan sesuai kebutuhan kolektif. Alat, strategi, atau metode yang digunakan dalam gerakan tersebut disesuaikan dengan fungsi sebagai bentuk pilihan strategi dan taktik gerakan atau aksi kolektif yang sedang dilakukan.

Dalam repertoar, Tilly berpendapat bahwa gerakan sosial merupakan gerakan yang terorganisir, bersifat dinamis, memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi tertentu, memiliki solidaritas juga identitas gerakan, dan melakukan tindakan menentang secara berkelanjutan. Bagi Tilly, repertoar merupakan tindakan yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan strategi dan taktik sebagai alat perlawanan untuk mewujudkan tujuannya.

Menurut Charles Tilly dalam bukunya “*From Mobilization to Revolution*” (Tilly, 1978), ada 5 unsur bagaimana terbentuknya prinsip dan strategi dalam gerakan repertoar yang akan dilakukan:

1. Unsur standar hak dan keadilan yang berlaku dalam kelompok

Pada unsur pertama ini, terbentuknya strategi dalam gerakan repertoar ini memiliki unsur untuk meninjau nilai apa yang dianggap sah dalam membuat strategi dalam suatu gerakan. Mempertimbangkan prinsip kesetaraan antara hak dan keadilan. Misalnya, prinsip kesetaraan yang tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, setara tidak berarti sama, namun sesuai dengan kebutuhan.

2. Unsur organisasi internal kelompok

Unsur kedua yang memengaruhi bagaimana terbentuknya strategi dalam repertoar adalah ditinjau dari struktur internal yang mendukung kelompok tersebut. Misalnya, orang-orang atau masyarakat tersebut tergabung ke dalam sebuah organisasi, maka aksi atau gerakan akan bersifat besar dan mudah dikoordinasikan. Namun sebaliknya, jika orang-orang atau masyarakat tersebut tidak tergabung ke dalam sebuah organisasi, maka protes aksi atau gerakan tersebut akan bersifat kecil.

3. Unsur rutinitas internal kelompok

Unsur ketiga yang memengaruhi terbentuknya repertoar adalah dilihat dari rutinitas yang memungkinkan strategi tersebut dijalankan. Misalnya, dilihat dari di mana kelompok tersebut berada. Jika keseharian kelompok tersebut individual, maka kemungkinan aksi atau gerakan akan bersifat kecil dan sulit dilakukan. Namun sebaliknya, jika kelompok tersebut berada dalam suatu kelompok, maka aksi atau gerakan akan bersifat besar dan mudah untuk dilakukan

4. Unsur pengalaman yang terakumulasi dari aksi kolektif sebelumnya

Unsur keempat yang memengaruhi terbentuknya strategi dalam repertoar aksi adalah pengalaman menjalankan strategi sebelumnya, atau apakah strategi yang pernah dilakukan dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Pada poin ini, pengalaman menjadi kunci untuk membentuk pilihan strategi. Misalnya, suatu kelompok memilih strategi demonstrasi dalam menyampaikan protes kepada otoritas, bisa dilihat apakah demonstrasi tersebut berhasil atau tidak, jika berhasil maka pada gerakan berikutnya bisa menggunakan strategi demonstrasi kembali sebagai strategi gerakan. Namun jika tidak berhasil, bisa menggunakan atau memilih strategi lain untuk membentuk sebuah gerakan.

5. Unsur pola represi di tempat kelompok berada

Unsur terakhir dalam membentuk suatu strategi dalam repertoar adalah melihat bagaimana respon otoritas dalam menghadapi strategi yang sedang digunakan pada suatu gerakan. Misalnya, dalam melakukan demonstrasi, apakah aparat atau pihak pemerintah membubarkan masa aksi tersebut atau sebaliknya bersifat longgar.

2.1.2 Gender dan Politik

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh John Money pada tahun 1955, dengan diperkenalkan sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk atas dasar konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini berkaitan dengan norma, perilaku, dan peran yang melekat pada diri manusia sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Dalam buku “Gender dan Politik” karya Dr. Ana Sabhana Azmy, M.IP. dan Dr. Ambarwati, M.Si. mereka menyebutkan bahwa dalam konsep gender ini kemudian muncul istilah maskulin dan feminine untuk menggambarkan sifat laki-laki dan perempuan (Azmy & Ambarwati, 2024).

Pengertian gender bukanlah berarti jenis kelamin, gender bukan suatu yang bersifat kodrati atau melekat seumur hidup dalam diri manusia. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang paling mendasar memanglah pada perbedaan jenis kelamin dan organ-organ tubuh di dalamnya. Gender bersifat relatif, dinamis atau bisa berubah, dan tidak selalu sama antara individu satu dengan individu yang lainnya, karena gender adalah tentang karakteristik atau sifat manusia.

Dengan perbedaan karakteristik ini, seiring berjalannya waktu maka muncul suatu konstruksi sosial yang mendefinisikan laki-laki sebagai kaum yang kuat, petualang, pelindung, pemegang kontrol, dan superioritas lainnya. Sedangkan perempuan didefinisikan sebagai kaum yang lembut, penyayang, pengasuh, rapuh, harus dilindungi, dan mudah didominasi. Menurut Aristoteles perbedaan karakteristik perempuan dan laki-laki ini tercipta secara alamiah dan biologis sebagai pembagian kerja.

Pada teori Performativitas gender yang diperkenalkan oleh Judith Butler dalam bukunya "*Gender Trouble*" (1990), ia mengatakan bahwa gender bukanlah suatu yang melekat dan tidak bisa berubah dalam diri manusia sejak lahir, gender bukanlah suatu atribut tetap. Melainkan, gender adalah sesuatu yang ditampilkan melalui serangkaian tindakan yang berulang sebagai identitas dan hasil dari performativitas. Performativitas ini berarti suatu tindakan atau perilaku yang dikonstruksi dan dilakukan secara terus-menerus sehingga menciptakan ilusi stabilitas dan kealamiahannya.

Butler memperlihatkan bagaimana gender dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat berubah, tergantung konteks dan interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu. Identitas gender ini bukanlah sesuatu yang lahir dari dalam diri seorang individu, melainkan dari ekspektasi dan konstruksi sosial yang seakan mengarahkan bagaimana seharusnya manusia berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang ia miliki sejak lahir. Proses ini bersifat *performative* karena tindakannya dilakukan secara terus-menerus, mengamini setiap konstruksi sosial dan lama-kelamaan menjadi suatu norma gender yang sah pada paradigma masyarakat (Inayah & Fauzi, 2024).

Performativitas gender mencakup tindakan sehari-hari seperti berperilaku, cara berpakaian, bahkan hingga cara berbicara yang dilakukan secara konsisten untuk mencerminkan gender tertentu. Dengan stabil dilakukan pada kehidupan sehari-hari yang artinya setiap individu masyarakat memvalidasi norma gender tersebut. Bagi Butler, gender tidak ditentukan secara biologis, namun diciptakan oleh kinerja setiap manusia dan bersifat performatif. Dan, ketika tindakan *performative*

seseorang tidak sesuai dengan norma gender yang ada, maka akan berpotensi menghadapi dan mendapatkan suatu penolakan dan diskriminasi dari masyarakat.

Dari konstruksi sosial inilah, muncul suatu dominasi dari kaum superior dan mempolitikasi setiap kesempatan dari konstruksi sosial yang sudah terbentuk. Bidang politik sebagaimana bidang sosial lainnya merupakan bagian dari ruang publik yang selama berabad-abad ini telah didominasi oleh laki-laki. Maka, gender dan politik akan selalu berkaitan satu sama lain. Dengan karakteristik maskulinitas yang dimiliki, laki-laki seakan berhak untuk mendominasi pada berbagai bidang kehidupan untuk kesejahteraan perempuan yang dianggap sebagai seorang manusia yang perlu dilindungi.

Dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” karya Prof. Miriam Budiardjo, Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah suatu usaha demi mencapai kehidupan yang lebih baik (Budiardjo, 2003). Dalam kehidupan, politik adalah suatu hal yang penting demi mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk semua masyarakat. Namun, usaha tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang kadang-kadang bertentangan dengan norma sosial yang ada. Politik juga berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, nilai, dan alokasi atau distribusi. Menurut Peter Merkl, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Namun, politik dalam bentuk yang paling buruk adalah usaha untuk mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan demi kepentingan diri sendiri.

Di masyarakat secara umum, lebih menerima peranan laki-laki daripada perempuan dalam hal pemegang kekuasaan. Anggapan ini divalidasi oleh masyarakat bahwa perempuan lebih baik berada di bawah kontrol atau kendali laki-laki. Di sinilah muncul asumsi bahwa jika hanya laki-laki saja yang memegang kekuasaan dan menjadi sosok pembuat kebijakan, lantas apakah setiap kebijakan yang keluar hanya akan menguntungkan kaum laki-lakinya saja, sedangkan perempuan berada pada strata kedua di bawah laki-laki? Maka, di ranah politik, identitas biologis mesti dikesampingkan dan mengutamakan kompetensi diri serta etos kerja setiap individunya saja. Supaya, setiap kebijakan yang disahkan dapat mewakili kebutuhan setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan seperti tujuan dari politik itu sendiri yaitu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2.1.3 Feminisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme diartikan sebagai gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme berasal dari kata "*femina*" yang berarti "perempuan". Feminisme muncul pertama kali di kalangan Eropa Barat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia bahkan sampai ke Indonesia. Feminisme merupakan sebuah pemikiran yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam intelektual, pendidikan, ekonomi, seksual, sosial, dan politik. Feminisme mencakup gerakan, ideologi, teori, filosofi yang berhubungan dengan persoalan kesetaraan gender untuk memberikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan (Ilaa, 2021).

Menurut Mahatma Gandhi dalam bukunya “Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial” (Gandhi, 2002) ia mengatakan bahwa kaum perempuan adalah mitra yang diciptakan dengan kemampuan-kemampuan yang setara. Kaum perempuan memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas kaum laki-laki, bahkan dalam detail yang sekecil-kecilnya. Kaum perempuan juga memiliki hak atas kemerdekaan dan kebebasan yang sama seperti yang dimiliki kaum laki-laki. Kaum perempuan berhak memiliki tempat tertinggi dalam ruang aktivitas apapun yang ia lakukan, sebagaimana laki-laki dalam ruang aktivitasnya.

Simone de Beauvoir, seorang tokoh feminis perempuan asal Prancis menganggap bahwa perempuan tidak dilahirkan untuk menjadi dirinya sendiri, namun sebagai sosok yang lain atau *the other* yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Simone de Beauvoir dengan bukunya yang fenomenal yaitu “*The Second Sex*” (1949). Dalam buku ini, Simone de Beauvoir membahas mengenai filsafat feminis. Buku ini menjelaskan bahwa perempuan selalu berada di strata kedua dalam segala aspek kehidupan di bawah laki-laki atau sebagai makhluk kelas dua dalam hierarki masyarakat patriarkis. Bahkan dalam buku ini, perempuan tidak mendapatkan hak apapun atas kepemilikannya, bahkan kepemilikannya terhadap dirinya sendiri (Beauvoir, 1989).

Sebagai suatu gerakan yang didukung oleh banyak pihak dan tokoh-tokoh perjuangannya, hingga saat ini sudah banyak Undang-Undang dan kebijakan yang menaungi keamanan dan kesetaraan bagi perempuan, feminisme sebagai suatu paham memiliki tahapan gelombang perkembangan dan aliran ideologinya (Azmy & Ambarwati, 2024).

Pada gelombang pertama, dilatarbelakangi oleh keinginan perempuan-perempuan Eropa untuk keluar dari dogma agama. Pada gelombang ini, banyak tulisan-tulisan yang muncul untuk berusaha menghadirkan kebebasan bagi perempuan yang pada masa itu terbelenggu oleh hegemoni kekuasaan monarki absolut pada abad pencerahan di Eropa. Puncaknya, terjadi revolusi Prancis juga munculnya organisasi *The Society of Revolutionary Republican Women* oleh Pauline Leon. Dengan keterlibatan para perempuan dalam revolusi itu, beberapa tuntutan turut dilayangkan seputar kebebasan, kesetaraan dalam bidang pendidikan, hak untuk memiliki harta atas namanya sendiri, meminta hak pilih dan dipilih dalam politik, kesetaraan gaji bagi perempuan pekerja, serta menuntut hak dan kenyamanan kondisi di lingkungan tempat kerja. Pada gelombang pertama ini, mulai munculnya aliran ideologi feminisme yaitu feminisme liberalis, feminisme radikal, dan feminisme marxis.

Gelombang kedua, ditandai dengan munculnya Perang Dunia II. Setelahnya, munculah tulisan Simone de Beauvoir pada tahun 1949 dan Betty Friedan pada tahun 1962. Pada gelombang kedua ini, hak politik perempuan sudah dirasakan namun perjuangan perempuan tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 1963, Betty Friedan meluncurkan bukunya "*The Feminist Mystique*" yang dianggap sebagai kebangkitan gelombang kedua. Dalam bukunya ini, Friedan mengatakan bahwa perempuan masih terpenjara dalam peranannya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga. Tuntutan pada gelombang kedua ini adalah hak untuk kebebasan bagi perempuan, hak aborsi, pendapatan upah setara, akses pendidikan, serta tunjangan perawatan anak. Pada gelombang kedua ini, muncul suatu dinamika

terkait isu rasis kepada perempuan kulit hitam pada tahun 1973. Dalam kaca mata perempuan kulit hitam, perempuan kulit putih sama dengan para penindas laki-laki kulit putih lainnya.

Gelombang ketiga, dimulai pada dasawarsa 1990-an. Pada kondisi gelombang ketiga ini, perempuan telah menikmati pendidikan tinggi, hak politik yang cukup setara, dan kesempatan kerja yang luas dan setara dengan laki-laki. Feminis pada gelombang ketiga ini menyadari bahwa hal dasar dalam memahami demokrasi adalah dengan paham kondisi perbedaan, kondisi laki-laki dan perempuan berbeda sehingga pemikiran tentang kesetaraan pun harus dikaji kembali. Karena pengalaman menjadi laki-laki tidak sama dengan pengalaman menjadi perempuan menurut Shelley Budgeon. Dinamika pada gelombang ketiga ini diwarnai dengan isu rasisme, homophobia, penyiksaan anak, transgender, heteroseksual, dan hak-hak reproduksi. Ania Malinowska salah satu tokoh feminis pada gelombang ini mulai aktif menggunakan media dan teknologi komunikasi dalam upaya pemberdayaan dan pendidikan bagi perempuan.

Gelombang keempat, muncul pada awal abad ke-21. Ditandai dengan munculnya gerakan feminisme dan kebebasan di media serta internet. Feminis gelombang keempat ini menyadari bahwa perlunya bergerak keluar dari dunia akademis dan memasuki wacana publik dengan memanfaatkan beberapa platform media sosial untuk menyebarkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga kampanye tentang kesetaraan gender, ras, dan kelas. Pada gelombang keempat ini juga, perempuan mulai memberanikan diri untuk menyentuh batas-batas ekstrem seperti membahas tentang pelecehan, homo, dan sebagainya.

Konsep “gelombang” ini merupakan metafora yang berguna secara sederhana untuk memberikan periodisasi atau tahapan pada setiap perkembangan gerakan feminisme. Namun terlepas daripada batasan-batasan ini, gerakan feminisme perlu untuk diperjuangkan secara terus-menerus dan berkembang demi kesetaraan gender. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, karena banyaknya ide dan gagasan mengenai perjuangan perempuan, pemikiran dan gerakan feminisme terbagi menjadi beberapa aliran diantaranya feminis liberal, feminis radikal, dan feminis marxis.

Pertama, feminisme liberal. Muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Seperti arti dalam kata “liberal” yaitu “bebas”, maka feminisme liberal adalah pandangan untuk memberikan kebebasan bagi perempuan dengan sebebaskan-bebasnya secara penuh. Berakar dari landasan rasionalitas yang membedakan antara dunia privat dengan dunia publik. Aliran feminisme liberal ini menganut bahwa perempuan dengan segala rasionalitasnya memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan pilihan hidupnya, dan tentunya memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki (Hariati, 2017).

Pada aliran feminisme liberal ini, munculah tokoh pelopor feminisme asal London, Britania Raya, Inggris. Seorang filsuf yaitu Mary Wollstonecraft dengan bukunya yang terkenal berjudul “*A Vindication of the Rights of Women*” (1792), menceritakan bagaimana perempuan berhak memiliki kebebasan dalam hidupnya selayaknya laki-laki untuk mengoptimalkan kemampuan dirinya (I. T. Fauziah *et al.*, 2025). Juga tokoh perempuan asal Amerika Serikat, seorang penulis sekaligus jurnalis yaitu Naomi Wolf yang menggagas tentang “Feminisme Kekuatan”.

Perempuan harus merasa bahwa mereka adalah golongan tertindas untuk menuntut hak berkarier dan tidak bergantung kepada laki-laki. Wolf berusaha menguatkan bahwa perempuan harus yakin dan percaya pada diri mereka sendiri, juga supaya perempuan dapat membuka pintu dunia agar dirinya berkembang (Rohmata *et al.*, 2018).

Pada aliran feminisme liberal, sudah mulai muncul organisasi yang memiliki fokus perjuangan pada gerakan feminisme yaitu *National Organization for Women* (NOW) yang berdiri pada tahun 1966 oleh tokoh aktivis perempuan Yahudi Amerika yaitu Betty Freidan. *National Organization for Women* (NOW) adalah sebuah organisasi penggerak hak asasi dan kesetaraan bagi perempuan. Organisasi ini bergerak untuk mengkampanyekan peningkatan representasi perempuan di lingkungan kerja dan di pemerintahan, mengkampanyekan untuk membuat rumah penitipan anak bagi seorang ibu yang bekerja, dan lainnya.

The Feminist Mystique (1963) adalah buku karya Betty Freidan, membahas mengenai peran ganda yang menimpa perempuan yaitu berkewajiban mengurus urusan domestik dan kewajibannya di tempat di mana ia bekerja. Konsep peran ganda pada dasarnya berakar dari paradigma yang memisahkan antara ruang domestik dengan publik. *The Feminist Mystique* mengungkapkan bahwa perlawanan perempuan yang bersifat tidak langsung merupakan bentuk perjuangan melawan struktur patriarki (Panjaitan *et al.*, 2024).

Kedua, feminisme radikal. Aliran feminisme ini muncul pada dasawarsa 1960-1970 an. Seperti arti dari kata “radikal” yang berarti “ekstrem”, pada aliran ini memandang bahwa perempuan mengalami penindasan disebabkan oleh stigma atau

pemikiran patriarkis yang mengobjekkan tubuh perempuan sebagai alat reproduksi semata, seks, dan perbedaan biologisnya (Rahman *et al.*, 2021). Aliran ini lebih berfokus pada ranah individu perempuan sebagai objek yang ditindas dan aliran yang dianggap kiri.

Pada masa aliran radikal, kembali muncul tokoh asal Amerika yang merupakan seorang penulis, pengajar, dan aktivis perempuan yaitu Kate Millet dengan bukunya yang fenomenal berjudul “*Sexual Politics: A Manifesto for Revolution*” (1970) yang dianggap sebagai kebangkitan feminisme radikal. Feminisme radikal dianggap menentang norma-norma masyarakat karena membahas mengenai perjuangan perempuan dalam ranah individu yaitu legalitas aborsi, seks bebas, hak asuh anak, dan juga ia mengakui bahwa dirinya adalah seorang kaum lesbi-an karena ia menganggap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah bentuk penindasan bagi perempuan. Kate Millett mengatakan bahwa hampir di dalam hidup perempuan adalah politik, termasuk ranah seksual (Azmy & Ambarwati, 2024).

Ketiga, aliran feminisme Marxisme pada abad ke-18 dan abad ke-19. Feminisme sebagai sebuah pemikiran Karl Marx ini berakar dari sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi berbasis kepemilikan pribadi dan kompetisi pasar. Feminisme Marxis ini memisahkan antara pekerjaan laki-laki yang mendapatkan upah dan pekerjaan domestik perempuan yang tidak mendapatkan upah sebagai prinsip dari kapitalisme. Kapitalisme ini membuat pekerjaan domestik yang harus dilakukan oleh perempuan tidak diakui dan tidak

perlu diberi upah, untuk menciptakan tenaga kerja murah dan mudah di eksploitasi (Larasati, 2023).

Karl Marx memandang bahwa masyarakat kapitalis tersusun atas dua kelas yaitu kaum borjuis (pemilik modal) dan kaum proletar (kelas pekerja). Tidak adanya nilai egaliter pada pemikiran masyarakat kapitalis ini mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diibaratkan sebagai kaum proletar yang dipaksa harus melakukan pekerjaan domestik tanpa pengakuan dan penghargaan. Bahkan untuk kebebasan sekalipun, dalam buku “Perempuan dalam Budaya Patriarki” karya Nawal El Saadawi mengatakan bahwa kebebasan adalah harga yang mesti dibayar oleh perempuan dengan kedamaian, ketenangan, dan kesehatan bila berhadapan dengan perlawanan serta serangan masyarakat terhadap perempuan. Perempuan tetap membayar dengan harga yang tinggi dalam hal apapun, bahkan bila untuk tunduk sekalipun, perempuan harus membayar dengan masa depannya, kebahagiaannya, dan kepribadiannya (Saadawi, 2001).

Tujuan feminisme Marxis yaitu ingin menghilangkan kelas-kelas dalam struktur masyarakat. Marxis memandang bahwa kapitalisme sebagai hubungan kekuasaan yang eksploitatif dan percaya bahwa pekerjaan domestik adalah bentuk sifat alamiah perempuan. Munculnya kelas kapitalis semakin menegaskan bahwa adanya garis pemisah antara ruang publik atau pekerjaan yang mendapatkan upah untuk laki-laki dan ruang privat atau pekerjaan yang tidak mendapatkan upah untuk perempuan. Dan, feminisme pada aliran Marxis ini berusaha untuk menghapuskan dan menghilangkan kelas berbasis gender di masyarakat (Urfan & Irma, 2023). Menurut Zillah Eisenstein dan Heidi Hartmann, mengatakan bahwa perempuan

tidak akan meraih keadilan sosial tanpa membubarkan patriarki dan kapitalisme (Maulidia, 2021).

Kesimpulannya, feminisme merupakan paham atau pemikiran suatu gerakan yang membela atau memperjuangkan perempuan. Sebagai sebuah pemikiran atau aliran, feminisme beranjak dari konsepsi tentang ketidaksetaraan gender. Pemikiran ini dimulai sejak abad ke-18 dan terus berkembang menjadi fase-fase dalam feminisme dan diperjuangkan hingga saat ini.

2.1.4 Kekerasan Gender

Salah satu topik dalam perjuangan gerakan sosial adalah gerakan feminisme, memperjuangkan hak asasi manusia dalam ranah individu dan publik serta keamanan bagi korban kekerasan berbasis gender. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu tindakan yang membahayakan baik secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media *online*.

Kekerasan dapat dikategorikan ke dalam 6 bentuk:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa alat pendukung. Misalnya, pembunuhan, perkelahian atau tawuran, penganiayaan, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa, dan hal serupa lainnya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan non fisik yang dilakukan bertujuan untuk membuat korban tidak nyaman secara mental. Kekerasan psikis ini dapat

berupa penghinaan, intimidasi, pengucilan, mempermalukan korban di hadapan umum, dan lain halnya yang serupa.

3. Perundungan atau *Bullying*

Perundungan atau *bullying* bisa dilakukan dengan cara kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Bisa berupa penghinaan, teror, mengejek, intimidasi, pengucilan, penganiayaan, dan lain halnya yang serupa.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan melecehkan, menyerang tubuh atau menyerang fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang akan berakibat pada penderitaan psikis serta fisik yang mengganggu kesehatan mental dan/atau reproduksi seseorang sehingga tidak dapat optimal dalam menjalani kehidupan. Kekerasan seksual ini berupa penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik serta identitas gender korban, perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, penyampaian ucapan dan tatapan bernuansa seksual serta rayuan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada korban, mengirim pesan atau gambar bernuansa pornografi, perbuatan mengambil, merekam, atau mengedarkan foto dan video bernuansa seksual, pelecehan verbal dan non-verbal, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan hal serupa lainnya.

5. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan suku, etnis, agama,

ras, warna kulit, status sosial dan ekonomi, jenis kelamin, serta fisik. Diskriminasi dan intoleransi ini misalnya, larangan dan pemaksaan tertentu berdasarkan perbedaan identitas, mengucilkan dan mengistimewakan orang tertentu berdasarkan perbedaan identitas, perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Misalnya, kebijakan tertulis seperti surat keputusan, surat edaran, pedoman, atau bentuk kebijakan tertulis lainnya yang berpotensi atau mengandung kekerasan.

Pada penelitian ini, peneliti tidak secara eksplisit membahas mengenai kekerasan seksual saja, melainkan dari bentuk kekerasan lainnya seperti diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan lainnya. Khususnya pada penelitian ini membahas mengenai tindakan yang merugikan terhadap kehidupan perempuan serta yang menjadikan perempuan sebagai korban dari suatu tindakan yang merugikan yaitu kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti pelaku menganggap bahwa korban berada pada kelas di bawahnya, pelaku menganggap bahwa korban berada pada perbedaan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah, juga seperti pelaku terdoktrin oleh sistem sosial dan budaya masyarakat sekitar bahwa korban berada pada strata kedua dalam struktur perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Namun, semua itu bermula dari sistem patriarki yang mengakar pada paradigma masyarakat sejak zaman dahulu. Patriarki

adalah sistem sosial di mana laki-laki berperan sebagai sosok yang dominan, memegang kekuasaan utama, pemegang otoritas, serta berperan sebagai pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan (Citraningtyas *et al.*, 2022).

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari tahu dan menganalisis bagaimana Lembaga Taman Jingga memandang terjadinya kekerasan berbasis gender, karena dari sinilah yang akan mendasari bagaimana Lembaga Taman Jingga mengimplementasikan setiap prinsip dan strateginya untuk tujuan kolektif dari suatu gerakan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Penulis menggali beberapa informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teoritis ilmiah serta perbandingan hasil penelitian tentang bagaimana gerakan feminisme yang dilakukan oleh beberapa organisasi. Beberapa penelitian terdahulunya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Josephine Anastacia	Praktik Feminisme dalam Kehidupan	Pada penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis praktik

	Herman, Wahyu Budi Nugroho, Gede Kamajaya	Anggota-Anggota Komunitas Feminis Space di Bali	feminisme dari anggota komunitas Feminis Space di Bali. Komunitas Feminis Space ini didirikan bertujuan sebagai wadah aspirasi bagi para anggotanya, karena pemaknaan feminisme antar individu tentu berbeda. Bali menjadi contoh bahwa patriarki masih menjadi tatanan sosial masyarakat, meski banyak perempuan di Bali yang memegang peranan penting dan mulia, namun posisinya masih saja tidak diapresiasi. Maka dari itu, perempuan muda di Bali bertekad untuk mendirikan komunitas Feminis Space sebagai wujud praktik feminisme. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa anggota komunitas Feminis Space memiliki pemaknaan beragam, sehingga pemaknaan feminis para
--	---	--	--

			anggotanya terbagi menjadi dua yaitu feminis sebagai pondasi dan feminis sebagai pandangan hidup. Selain itu, feminis juga dianggap sebagai landasan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Adanya komunitas ini menjadi sebuah dorongan untuk mematahkan stereotipe negatif yang merugikan perempuan. Pemaknaan dan praktik feminisme yang dilakukan oleh para anggota komunitas Feminis Space adalah wujud dari nilai-nilai feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir, karena secara tidak langsung sudah dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dari para anggota komunitas Feminis Space dengan cara bekerja, menolak subordinasi, dan menjadi agen
--	--	--	---

			intelektual (Anastacia <i>et al.</i> , 2024).
2	Lorie Paras Ayuning, Yuanita Setyastuti, dan Astinana Yuliarti	Instagram Komunitas Pergerakan Feminisme @narasi_perempuan dan Upaya Pemberdayaan Perempuan Banjarmasin	Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram komunitas pergerakan feminisme yaitu @narasi_perempuan sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan teori dari feminisme liberal untuk membahas secara mendalam mengenai media Instagram dalam rangka mengupayakan pemberdayaan perempuan. Hasil pada penelitian ini adalah komunitas Narasi Perempuan mampu mengupayakan pemberdayaan perempuan di kota Banjarmasin dengan menggunakan tahapan-tahapan melalui media sosial Instagram.

			Tahapan tersebut antara lain yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku dengan sosialisasi melalui pesan persuasif, pemberitaan isu-isu lokal serta nasional mengenai perempuan, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dilaksanakan dengan pemanfaatan fitur <i>posting</i> di <i>feeds</i>, <i>story</i>, dan <i>highlight</i> Instagram, kemudian tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan menuju kemandirian yang dilaksanakan dengan pemanfaatan fitur <i>live</i> pada Instagram serta pada fitur Instagram TV. Tahap terakhir, yaitu berkolaborasi dengan komunitas lain dan masyarakat dengan konten utama yaitu
--	--	--	---

			“Bakisahan” serta kegiatan <i>reposting</i> . (Ayuning <i>et al.</i> , 2021).
3	Leo Agung Azer Sumampouw, Michelle Patricia, Nur Fatima Nazwa Zamaya	Analisis Komunitas Feminis Yogya (Gender Mahardika) Yogyakarta	Komunitas feminis Yogyakarta merupakan salah satu komunitas yang berfokus untuk memperjuangkan kesetaraan gender di kehidupan masyarakat. Komunitas Gender Mahardika atau yang lebih dikenal dengan nama Komunitas Feminis Yogya berusaha mendobrak budaya patriarki yang ada di Indonesia sehingga tidak ada stigma atau pandangan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan melalui kegiatan atau <i>event</i> yang diselenggarakan. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas ini adalah WSD (<i>Women Self-Defense</i>), yang bertujuan untuk mengajarkan seni bela diri taktis untuk menghadapi kejahatan yang menggunakan

			fisik. Komunitas ini merupakan sebuah ruang yang memiliki pandangan feminis dikala berkehidupan di masyarakat sekarang, dan dijadikan sebagai ruang aduan bagi perempuan-perempuan yang mengalami peristiwa ketidaksetaraan gender di Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan konsistensi gerakan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, utamanya dalam perbaikan keanggotaan komunitas atau perawatan internal, antara lain: aspek geografis, aspek demografis, aspek struktural, dan aspek masalah serta tujuan (Sumampouw <i>et al.</i>, 2023).
--	--	--	---

4	Nadya Kharima, Lugita Nurhajar, Yulianti	Konstruksi Gerakan Feminis Muslim Melalui Konsep Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari)	Sejak diterbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender, ini menjadi awal masifnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap program dan kebijakan di Indonesia. Kemudian, gerakan feminisme menjadi perhatian juga oleh tokoh islam dan dilakukan pengkajian ulang terhadap tatanan hukum islam. Selain konsep dalam islam, reformasi hukum dan kebijakan mengharuskan pemberdayaan bagi perempuan demi menjunjung kesetaraan gender. Tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat bagaimana gerakan feminisme muslim dilakukan oleh komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari sebagai organisasi akar rumput yang dipimpin oleh perempuan muslim dengan beranggotakan
---	--	--	---

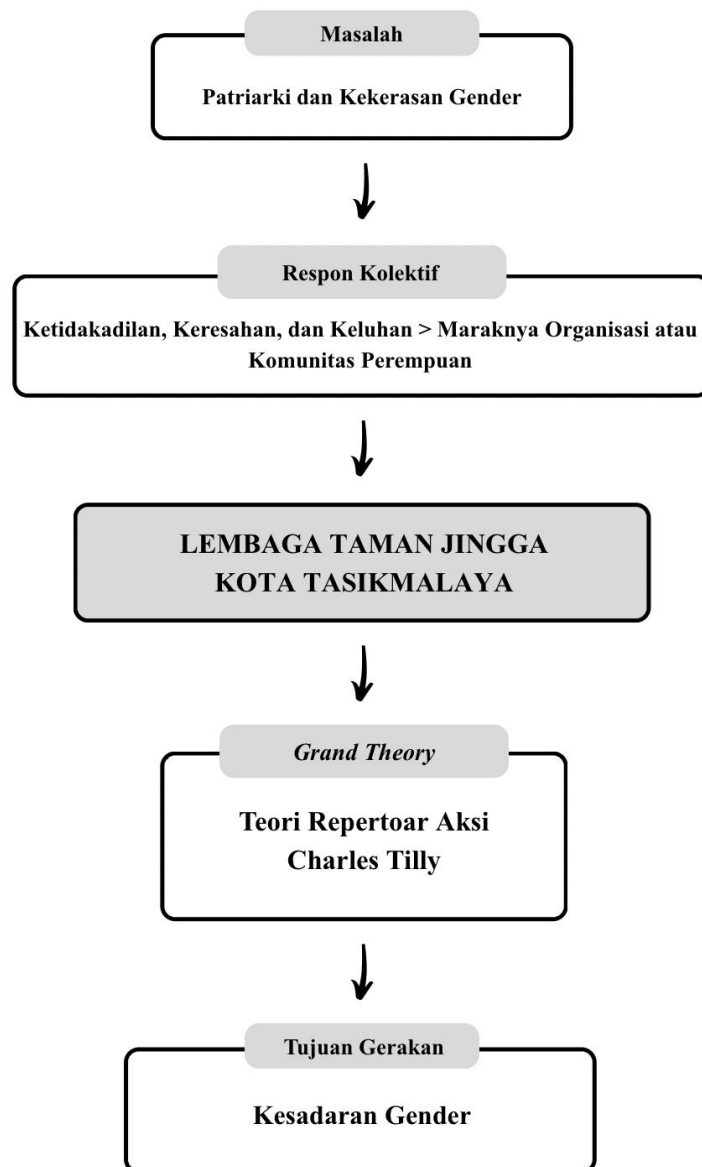
			mayoritas muslim pula. Hasilnya, bahwa komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari dibentuk pada tahun 2017 dengan memiliki fokus terhadap 3 isu yaitu pengembangan ekonomi kolektif, kesetaraan gender, dan pertanian alami. Harapannya, perempuan nelayan bisa berdaya secara ekonomi melalui pengembangan kapasitas terkait usaha kolektif olah pangan hasil laut, berdaya secara politik, serta mendapatkan hak-haknya sebagai nelayan (Kharima <i>et al.</i>, 2024).
5	Zikri Fachrul Nurhadi, Yandi Hermawandi, Salma Rosvita Dewi Ningindah	Konstruksi Realitas Gerakan Feminisme pada Komunitas Magnalene.co dalam Menyuarakan Hak Perempuan	Latar belakang pada penelitian ini bahwa adanya bentuk realitas sosial yaitu gerakan feminisme pada komunitas Magnalene.co dalam menyuarakan hak perempuan dan kesetaraan gender. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan gerakan

			feminisme pada komunitas Magnalene.co dalam menyuarakan hak perempuan dilihat dari segi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasilnya, eksternalisasi konstruksi realitas dalam gerakan feminisme dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kesadaran akan ketidakadilan pada perempuan. Objektivasi terjadi melalui upaya untuk mendapatkan perhatian publik demi dapat memobilisasi dan memengaruhi opini masyarakat melalui media yang membahas mengenai isu feminisme. Terakhir, proses internalisasi terjadi ketika anggota dari komunitas Magnalene.co mengadopsi nilai-nilai feminisme dan mengintegrasikannya dalam kehidupan pribadi, memperjuangkan kesetaraan
--	--	--	--

			gender, memperjuangkan hak perempuan, dan keadilan sosial yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak ketika berhadapan dengan isu perempuan (Nurhadi <i>et al.</i> , 2024).
--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan skema untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang berisi poin-poin penting dalam pembahasan. Kerangka pemikiran ini digunakan juga sebagai ladaan untuk penelitian yang merupakan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang diukur dan diamati melalui penelitian yang akan dilakukan (Tumurang, 2024). Pada penelitian ini, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian muncul karena adanya suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pada penelitian ini, didasari oleh adanya suatu permasalahan yang bersumber dari sumber daya manusia dan hasil dari konstruksi sosial yang sudah lama terbentuk. Budaya patriarki dan kekerasan gender utamanya

kepada perempuan menjadi permasalahan repetitif yang terjadi saat ini di tengah masyarakat. Hal lain yang menjadi permasalahan juga bersumber dari kurang optimalnya peran atau kinerja dari perangkat pemerintah dalam menangani suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga muncul suatu ketidakadilan, keresahan, dan keluhan dari masyarakat atau dalam hal ini yaitu korban.

Dengan pemahaman bahwa gender bukan berarti jenis kelamin, gender bukanlah suatu hal yang bersifat kodrati atau melekat seumur hidup dalam diri manusia, gender merupakan karakteristik laki-laki dan perempuan yang diatur oleh konstruksi sosial di masyarakat hingga pada akhirnya muncul perbedaan yang bukan berdasar pada perbedaan jenis kelamin.

Gender lahir dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Adanya diskriminasi hingga kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan karena perempuan adalah manusia yang berhak mendapatkan kebebasan, keamanan, dan kenyamanan hidup. Perempuan berhak mendapatkan hak hidup yang sama apapun karakter dan sifatnya sebagai manusia.

Maraknya organisasi muncul yang berfokus pada perjuangan membela perempuan justru menjadi kritik bagi instansi pemerintah karena dalam menghadapi suatu kasus dirasa kurang optimal, sampai-sampai mestilah masyarakat sendiri yang harus menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan melalui perangkat organisasi. Dan faktanya, para korban lebih mempercayai dan merasa aman kepada pihak organisasi, bukan kepada perangkat formal pemerintah.

Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya merupakan sasaran penelitian yang akan penulis analisis untuk mengetahui bagaimana gerakan feminisme yang

dilakukan oleh organisasi ini dalam memperjuangkan isu perempuan. Organisasi merupakan wadah berkumpulnya setiap individu yang memiliki kesamaan cara berpikir, ideologi, visi dan misi, serta tujuan yang ingin diperjuangkan dalam suatu gerakan sosial. Organisasi merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang memiliki keresahan serta ketidakpuasan yang sama terhadap suatu konstruksi sosial. Organisasi sebagai wahana kolektif berisikan banyaknya sumber daya manusia yang memiliki tujuan dan fokus perjuangan secara bersama-sama.

Untuk menemukan jawaban dari penelitian ini tentang apa yang menjadi cara, strategi, atau prinsip dari gerakan feminisme yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya, penulis menggunakan teori repertoar aksi dari Charles Tilly sebagai teori utama. Dengan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, peneliti akan mengidentifikasi serta menganalisis prinsip dan strategi gerakan Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi berdasarkan pada teori repertoar aksi ini. Repertoar aksi adalah bagian dari teori gerakan sosial yang merupakan serangkaian cara atau strategi yang digunakan untuk memperlihatkan dan menyampaikan gerakan terhadap suatu fenomena atau kebijakan tertentu. Repertoar adalah seperangkat alat, strategi, atau metode yang digunakan oleh suatu organisasi atau komunitas untuk meraih dan mencapai keinginan sesuai kebutuhan kolektif.

Teori repertoar aksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk gerakan atau tindakan kolektif yang digunakan oleh suatu organisasi atau komunitas untuk menyampaikan tujuannya. Alat, strategi, atau metode yang digunakan dalam gerakan tersebut disesuaikan dengan fungsi atas persetujuan kolektif sebagai bentuk

pilihan strategi dan taktik gerakan atau aksi kolektif yang sedang diperjuangkan. Charles Tilly menjelaskan bahwa repertoire adalah sekumpulan alat yang dapat dipergunakan oleh kelompok masyarakat untuk mencapai keinginan kolektif. Repertoire sebagai alat interaksi di antara kelompok masyarakat dalam jumlah besar. Dengan demikian, menggunakan teori repertoire aksi dari Charles Tilly, peneliti akan mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian yang sudah direncanakan. Untuk mencari tahu mengenai prinsip, strategi, nilai, serta landasan gerakan feminisme yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya.

Maka, hasil penelitian nantinya dengan prinsip dan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Taman Jingga Kota Tasikmalaya, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, mengedukasi, dan membuat suatu perubahan konstruksi di masyarakat agar terhapusnya budaya patriarki dan kekerasan gender.